

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Batu sebelumnya adalah wilayah yang administratif yang tergabung dengan Kabupaten Malang, pada 6 Maret 1993 ditetapkan menjadi kota administratif. Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2001 Kota Batu ditetapkan sebagai kota otonom yang bukan lagi wilayah administratif dari Kabupaten Malang. Dimana Kota Batu masih memiliki beberapa trayek angkutan umum yang beroperasi sampai saat ini dan masih diminati oleh masyarakat sebagai pilihan moda transportasi di Kota Batu itu sendiri.

Angkutan umum di Kota Batu pada saat ini memiliki sejumlah 9 trayek yang beroperasi, dimana dengan kapasitas angkutan umumnya sebesar penumpang. Dimana saat ini terdapat sebanyak 348 armada angkutan umum yang terdaftar, dimana angkutan umum yang masih beroperasi sebanyak 101 armada angkutan umum.

Dalam penyelenggaraan operasional suatu angkutan umum diperlukannya suatu penetapan tarif bagi pengguna jasa. Dimana penetapan tarif tersebut harus sesuai dengan berbagai sudut pandang seperti sudut pandang pengguna jasa, sudut pandang pemerintah, serta sudut pandang pengusaha. Dimana pengguna jasa berkaitan dengan kemampuan dan kemauan masyarakat dalam membayar biaya jasa angkutan umum. Dalam sudut pandang pemerintah atau regulator terkait kebijakan dengan masyarakat. Dan untuk sudut operator terkait dengan biaya yang dikeluarkan dalam menyelenggarakan angkutan umum itu sendiri. Dimana pemerintah Kota Batu telah menetapkan tarif berdasarkan Peraturan Walikota Batu No. 26 Tahun 2013 tentang Tarif Angkutan Umum di Wilayah Kota Batu.

Pada saat ini terdapat perbedaan antara tarif eksisting terhadap tarif yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Batu, yang mana dari 9 trayek yang beroperasi terdapat perubahan tarif pada 8 trayek yang

beroperasi berdasarkan Peraturan Walikota Batu No.26 Tahun 2013 tentang Tarif Angkutan Umum di Wilayah Kota Batu.

Dalam penyelenggaraanya angkutan umum di Kota Batu terdapat 2 trayek yang memiliki tingkat kenaikan tarif melebihi dari 50% dari tarif yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Batu. Dimana kedua trayek tersebut adalah BSS dengan tarif eksisting sebesar Rp. 10.000 dengan kenaikan sebesar Rp. 6.000 dari tarif yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu sebesar Rp. 4.000. Selanjutnya yaitu BNK dengan tarif eksisting sebesar Rp. 15.000 dengan kenaikan sebesar Rp. 10.000 dari tarif yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu sebesar Rp. 5.000 dari tarif yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kenaikan tarif ini sendiri disebabkan oleh naiknya harga-harga barang yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan angkutan umum seperti bahan bakar minyak (BBM), suku cadang, oli, biaya uji kir, gaji pengemudi, dan lainnya hal tersebut merupakan alasan para operator untuk menaikkan tarif.

Dengan perbedaan tarif eksisting dengan tarif yang ditetapkan menyebabkan konflik antara operator dengan user. Dimana user menginginkan tarif kembali lagi sesuai dengan SK yang berlaku. Namun pada kenyataan dilapangannya terjadi banyak kenaikan terhadap harga dari komponen atau biaya operasional lainnya pada angkutan umum. Sehingga mengakibatkan kerugian pada operator karena keenganan penumpang dalam membayar tarif angkutan umum sesuai dengan tarif eksisting.

Oleh karena itu perlunya dilaksanakan evaluasi tarif angkutan umum di Kota Batu agar dapat memberikan tarif yang sesuai baik dari sudut pandang pengguna jasa, sudut pandang pemerintah, serta sudut pandang pengusaha. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut sebagai judul Kertas Kerja Wajib (KKW) yaitu **"Evaluasi Tarif Angkutan Umum Di Kota Batu"**

1.2. Identifikasi Masalah

Dengan permasalahan yang terjadi dilapangan, dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

Dengan permasalahan yang terjadi dilapangan, dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

1. Terdapat selisih tarif yang tinggi pada trayek BSS dengan kenaikan sebesar Rp. 6.000 dan BNK dengan kenaikan sebesar Rp. 10.000 dari tarif yang telah ditentukan oleh pemerintah.
2. Terdapat perbedaan antara kondisi tarif eksisting dengan kondisi tarif yang ditetapkan pemerintah (Peraturan Walikota Batu No. 26 Tahun 2013).
3. Terdapat dampak tarif baru terhadap pengeluaran operator

1.3. Rumusan Masalah

Dengan permasalahan yang terjadi di lapangan, dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kondisi perbandingan antara tarif eksisting dengan tarif berdasarkan SK pada trayek BSS dan BNK?
2. Bagaimana usulan penentuan tarif untuk trayek Batu-Seleccta-Sumberbrantas dan Batu-Ngantang-Kasembon dari sisi operator dan regulator?
3. Bagaimana dampak tarif baru terhadap pengeluaran operator (supir)?

1.4. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka rumusan masalah dalam Kertas Kerja Wajib ini adalah :

1.3.1 Maksud

Untuk melakukan kajian terhadap evaluasi tarif angkutan perkotaan studi kasus trayek Batu-Seleccta-Sumberbrantas dan Batu-Ngantang-Kasembon di Kota Batu.

1.3.2 Tujuan

- a. Meninjau kondisi antara tarif eksisting angkutan umum dengan tarif sesuai SK pada trayek BNK dan BNS.
- b. Menentukan bagaimana usulan tarif dari trayek Batu-Seleccta-Sumberbrantas dan Batu-Ngantang-Kasembon
- c. Melihat dampak dari penerapan tarif baru terhadap operator (supir)

1.5. Batasan Masalah

Untuk menghindari perluasan tinjauan dan penyimpangan dari rumusan masalah, maka diperlakukan adanya pembatasan masalah yang ditinjau. Batasan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini hanya membahas 2 trayek angkutan Perkotaan Kota Batu yaitu pada trayek Batu-Seleccta-Sumberbrantas dan Batu-Ngantang-Kasembon
2. Penelitian ini hanya menganalisis tarif berdasarkan perhitungan Biaya Operasional Kendaraan (BOK) angkutan perkotaan, Biaya Operasional Kendaraan (BOK) supir.
3. Penelitian ini hanya membandingkan tarif yang dilihat dari dua sisi yaitu operator dan regulator yang bertujuan sebagai gambaran untuk pemerintah dalam penetapan tarif angkutan perkotaan yang berlaku.